



**IMPLEMENTASI PASAL 7 AYAT (2) PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2006
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA (STUDI
KASUS DI AEK SIJORNI DESA AEK LIBUNG KECAMATAN SAYUR
MATINGGI KABUPATEN TAPANULI SELATAN)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat- syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara*

Oleh
ADHIA RAHMA SHINTA HARAHAHAP
NIM. 1610300007

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2020**



**IMPLEMENTASI PASAL 7 AYAT (2) PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2006
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAAHRAGA (STUDI
KASUS DI AEK SIJORNI DESA AEK LIBUNG KECAMATAN SAYUR
MATINGGI KABUPATEN TAPANULI SELATAN)**

SKRIPSI

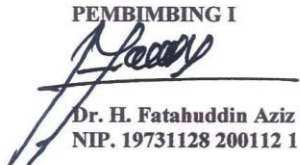
*Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara*

Oleh:

**ADHIA RAHMA SHINTA HARAHAP
NIM. 1610300007**

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

PEMBIMBING I


**Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001**

PEMBIMBING II


**Dermina Dalimunthe, M.H
NIP. 19710528 200003 2 005**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022
website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> – e-mail : fasih141@psp@gmail.com

Hal : Skripsi

A.n. **Adhia Rahma Shinta Harahap**

Padangsidempuan, November 2020

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

IAIN Padangsidempuan

Di-

Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Adhia Rahma Shinta Harahap** yang berjudul **"Implementasi Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Studi Kasus di Aek Sijorni Desa Aek Libung Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan)"**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II

Dermina Dalimunthe, M.H
NIP. 19710528 200003 2 005

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adhia Rahma Shinta Harahap
NIM : 16 10300 007
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Daerah
Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 10 Tahun 2006
Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
(Studi Kasus di Aek Sijorni Desa Aek Libung
Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli
Selatan)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yatu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, Januari 2021



ADHIA RAHMA SHINTA HARAHAP

NIM. 16 10300 007

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai Civitas Akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan,
saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Adhia Rahma Shinta Harahap
NIM : 16 103 00007
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan **Hak Bebas Royalti Non Eksklusif** (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **IMPLEMENTASI PASAL 7 AYAT (2) PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA (STUDI KASUS DI AEK SIJORNI DESA AEK LIBUNG KECAMATAN SAYUR MATINGGI KABUPATEN TAPANULI SELATAN)**

Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalihkan media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai Penulis dan sebagai Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal, Januari 2021
Yang Menyatakan,




Adhia Rahma Shinta Harahap
NIM. 16 103 00007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://fasih.iain-padangsidempuan.ac.id> – email: fasih@iain_padangsidempuan.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Adhia Rahma Shinta Harahap

NIM : 16 103 00007

Judul Skripsi : Implementasi Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Studi Kasus di Aek Sijorni Desa Aek Libung Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan)

Ketua

Dra. Asnah, M.A.
NIP 19651223 199103 2 001

Dra. Asnah, M.A.
NIP 19651223 199103 2 001

Puji Kurniawan, MA.Hk.
NIP 19871210 201905 1 008

Sekretaris

Dermina Dalimunthe, S.H., M.H.
NIP 19710528 200003 2 005

Anggota:

Dermina Dalimunthe, S.H., M.H.
NIP 19710528 200003 2 005

Ahmatnizar, M.Ag.
NIP 19680202 200003 1 005

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,

Di

: Padangsidempuan

Hari/Tanggal

: Senin, 22 Maret 2021

Pukul

: 14.00 WIB s/d selesai

Hasil/Nilai

: A/84

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

: 3,86

Predikat

: Pujian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

PENGESAHAN

Nomor: 363 /In.14/D/PP.00.9/04/2021

Judul Skripsi : Implementasi Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga (Studi Kasus di Aek Sijorni Desa Aek Libung Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan)

Ditulis Oleh : Adhia Rahma Shinta Harahap
NIM : 1610300007

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)



Padangsidempuan, 19 April 2021

Dekan,


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : **Adhia Rahma Shinta Harahap**
Nim : **16 10300 007**
Judul Skripsi : **Implementasi Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Studi Kasus di Aek Sijorni Desa Aek Libung Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan)**
Tahun : **2020**

Permasalahan dalam penelitian ini adalah seberapa jauh mengenai Implementasi Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Aek Sijorni Desa Aek Libung Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan. Karena retribusi yang dipungut tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Aek Sijorni Desa Aek Libung Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan. Penulis memunculkan rumusan masalah yaitu Bagaimana implementasi retribusi tempat rekreasi di Aek Sijorni dan apa faktor penghambat implementasi retribusi tempat rekreasi di Aek Sijorni Kabupaten Tapanuli Selatan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif yaitu menggambarkan fenomena-fenomena atau kejadian yang terjadi di lapangan. Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini adalah bahwa implementasi Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga bahwa dari pihak pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan belum terlaksana karena banyaknya regulasi yang mengatur tentang besaran retribusi tempat rekreasi yang berbeda. Namun dalam pelaksanaannya pihak pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan telah melakukan sosialisasi dan mediasi dengan masyarakat bersama Camat Kecamatan Sayur Matinggi dan Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Selatan. Faktor penghambat dalam Implementasi Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Aek Sijorni adalah status kepemilikan lahan menuju Aek Sijorni, Pola Pikir Masyarakat yang Masih Terbelakang, Kurangnya Komunikasi Antara Masyarakat dengan Pemerintah dan Status Pekerjaan Masyarakat Setempat.

Kata Kunci : Implementasi, Retribusi, Tempat Rekreasi.

KATAPENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidaya-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut di contoh dan di teladani, *madinatul'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapan berserta keluarga dan para sahabatnya. Aamiin.

Skripsi ini berjudul: “Implementasi Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Studi Kasus di Aek Sijorni Desa Aek Libung Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan)” Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Hukum di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.

Skripsi ini di susun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asna, MA., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Ibu Dermina Dalimunthe, M.H Sebagai Ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Dermina Dalimunthe, M.H sebagai pembimbing II yang membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Bapak Sawaluddin, M.A, selaku dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah banyak memberi motivasi.
7. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Yusri Fahmi, S. Ag., M. Hum sebagai Kepala Perpustakaan yang telah menyediakan buku-buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Terimakasih kepada Ayahanda tercinta Idham Khalik Harahap dan Ibunda tersayang Ariyanti Raya Siregar yang telah banyak melimpahkan pengorbanannya, kasih sayang serta do'a yang senantiasa mengiringi langkah penulis hingga sejauh ini. Semoga surga menjadi balasan untuk kalian berdua.
10. Saudara saya, Mora Tama Saputra dan Tiara Yunita Harahap yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam menuntut ilmu. Semoga kalian selalu di lindungi oleh Allah SWT.
11. Bapak Abdul Saftar Harahap selaku Kepala Dinas Pariwisata Tapanuli Selatan beserta stafnya, yang telah membantu, mengizinkan saya dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
12. Terimakasih kepada sahabat seperjuangan saya Karina Romaliani, S.H, Lili Rahmawati Siregar, S.H, Mufida, Nur Asiah Galingging, S.H, Indri Lestari Pasaribu, S.H, Yosi Hamidi Lubis, Elma Ariska Sitompul, Ulfa Khairani Lubis, Dewi Indriani, S.E, Khoiriyah Siregar, Nelmi Dahannum Dalimunthe, S.E, yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Terimakasih kepada Rusdi Abadi Siregar, Dean Antono Putra, S.H, Iskandar Abdullah Rambe, Syaiful Akhyar Harahap atas Semua Bantuan dan Dukungan selama Proses Kuliah ini.
14. Keluarga besar hukum tata negara angkatan 2016, khususnya Rizki Rumondang, Anggun Sri Rizki, Mila Dani, Linda Sari, Ary Ananda Pane,

Ardiansyah Harahap, Muhammad Zalil, Munahayati yang selalu ada dan saling membantu selama masa perkuliahan. Umumnya untuk semua teman seangkatan 2016, HES, IAT, AS dan HPI.

15. Terimakasih atas bantuan dan kerjasama semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SubhanahuWaTa'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini jika ada saran dan kritik yang membangun penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padang sidimpuan, Januari 2021
Penulis,

Adhia Rahma Shinta Harahap
NIM. 1610300007

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	Fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— ُ	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....يْ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan i
وْ.....	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....اْ.....	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ىْ.....	<i>Kasrah</i> dan ya	ī	I dan garis di bawah
.....وْ.....	<i>Dommah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- Ta marbutah hidup, yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati, yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan ke dua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ٓ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

6. *Hamzah*

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bias dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI AKADEMIK.....	iv
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH	v
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xii
DAFTAR ISI.....	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah.....	7
C. Batasan Istilah	7
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian.....	9
G. Sistematika Pembahasan	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Landasan Teori	14
1. Implementasi Kebijakan	14
2. Perda Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 10 Tahun 2006	19
3. Retribusi Daerah	21
4. Perspektif Fiqh Siyasah tentang Retribusi	26

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	31
B. Jenis Penelitian	31
C. Subjek Penelitian	32
D. Sumber Data	32
E. Metode Pengumpulan Data	36

F. Metode Analisis Data	37
G. Metode Uji Keabsahan Data.....	38

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	40
B. Implementasi Kebijakan Retribusi	46
C. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Retribusi	51
D. Analisis Penulis	55

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	58
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah di setiap daerahnya, kekayaan alam tersebut memiliki potensi untuk dijadikan tempat rekreasi yang tentunya dapat menarik minat masyarakat sekitar atau masyarakat luar kota bahkan mancanegara. Dengan adanya tempat rekreasi tentu saja dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar maupun pendapatan asli daerah. Dalam melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan negara, pemerintah harus memiliki wewenang dalam hal tersebut. Seperti halnya pemerintah pusat menyerahkan urusan daerah kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri sesuai dengan kepentingan atau kebiasaan daerahnya.

﴿ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَنْقُومِ آعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۖ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ ﴾

Dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku Amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya).¹

Indonesia merupakan Negara hukum (*rechtsstaat*). Konsep Negara hukum di indonesia diwarisi dari colonel belanda, semakna dengan *rule of*

¹ Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Al-Huda, 2005), hlm. 228.

law yang berlaku di Inggris dan Amerika Serikat serta Negara Anglo Saxon lainnya. Ini berarti semua tindakan pemerintah sebagai wakil Negara harus berdasarkan pada hukum, demikian juga ketaatan warga Negara kepada pemerintahnya juga berdasarkan hukum.²

Secara sederhana, hukum dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.³

Dalam mengatur suatu daerah, pemerintah daerah setempat perlu menetapkan suatu peraturan untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat di daerah tersebut. Pelaksanaan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah tentu saja harus dipatuhi dan dilaksanakan dengan baik dan benar oleh setiap kalangan masyarakat agar terciptanya kehidupan bermasyarakat yang adil, aman dan tentram. Dalil hukum yang mewajibkan untuk menaati pemerintah seperti melaksanakan dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan terdapat dalam QS. An-Nisaa: 59.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِى شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ ۚ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat

²Zul Anwar Ajim Harahap, *Dampak Pelaksanaan Peraturan Daerah Terhadap Pemakaian Busana Muslim Di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara*, Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial, Vol. 4, No. 1 (2018), hlm. 1.

³Hendra Gunawan, *Karakteristik Hukum Islam*, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan, Vol. 2, No. 2 (2018), hlm. 107.

tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.⁴

Dalam ayat tersebut secara umum dijelaskan bahwa kita sebagai orang beriman harus taat kepada Allah, taat kepada rasul-Nya, dan kepada pemimpin diantara kita termasuk untuk mematuhi ketika ada perintah dan larangan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Tertulis pada Pasal 18 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan *“Pemerintah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantu”*.⁵ Sehingga dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah semakin memperkuat posisi Pemerintah Daerah dalam mengurus dan mengelola urusan rumah tangganya sendiri atau yang disebut dalam Undang-Undang tersebut sebagai otonomi daerah. Pasal 1 Butir 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *“Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”*.⁶ Dengan adanya Otonomi Daerah dipacu untuk dapat mendukung pendapatan asli daerah. Sumber pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari

⁴ Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Al-Huda, 2005), hlm. 87.

⁵ UUD 1945 Pasal 18 Ayat (2).

⁶ Pasal 1 Butir 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah.

Diatur dalam Pasal 23A UUD 1945 yaitu *“pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”*.⁷ Kemudian ditetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa *“Retribusi Daerah yaitu pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan kepada pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”*.⁸

Dengan demikian Pemerintah Daerah Tapanuli Selatan mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga. Dalam Perda tersebut telah diatur besar retribusi/pungutan yang harus dibayar oleh pengunjung yang datang ke tempat rekreasi. Seperti yang ditetapkan dalam:

Pasal 7 ayat (2) Perda Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga bahwa untuk setiap kali masuk ke kawasan tempat rekreasi dalam Kabupaten Tapanuli Selatan dipungut retribusi sebagai berikut: a) Orang Dewasa: Rp. 1.000,-/ orang; b) Anak- anak: Rp. 500,-/ orang; c) Kendaraan Roda Dua: Rp. 1.000,-/ unit; d) Kendaraan Roda Empat: Rp. 2.000,-/ unit; e) Kendaraan diatas Roda Empat: Rp. 3.000,-/ unit.⁹

Untuk memasuki tempat rekreasi yang dikelola oleh pemda tentu saja perlu dikenakan retribusi. Retribusi yang dapat diartikan sebagai akibat

⁷ UUD 1945 Pasal 23A.

⁸ Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

⁹ Pasal 7 Ayat (2) Perda Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.

adanya kontra prestasi yang diberikan oleh pemda/pembayaran tersebut didasarkan atas prestasi/pelayanan yang diberikan pemda yang langsung dinikmati secara perseorangan oleh warga masyarakat dan pelaksanaannya atas peraturan yang berlaku, sedangkan menurut kamus Bahasa Indonesia, Retribusi adalah Pungutan uang oleh pemerintah (Kota Praja dan sebagainya) sebagai balas jasa.¹⁰ Menurut Rohmat Sumitro Bahwa Retribusi Daerah adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan kepada mereka yang menggunakan jasa-jasa negara, Artinya retribusi daerah sebagai pembayaran atas jasa atau karena mendapat pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan, atau jasa yang diberikan oleh daerah baik secara langsung maupun tidak langsung.¹¹

Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan daerah yang memiliki banyak kekayaan alam yang bisa meningkatkan pendapatan asli daerah apabila dikelola dengan baik. Salah satu kekayaan alam yang dijadikan tempat rekreasi yaitu Aek Sijorni. Aek Sijorni adalah tempat rekreasi yang berada di Desa Aek Libung, Kecamatan Sayur Matinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatra Utara. Aek Sijorni merupakan salah satu tempat rekreasi yang dikelola oleh pemerintah daerah. Tempat ini sangat ramai pada hari libur, terutama saat hari lebaran dan tahun baru.

Penetapan pungutan pada tempat rekreasi perlu disesuaikan dengan fasilitas tempat rekreasi tersebut. Pungutan yang dikenakan tentu saja

¹⁰ Abdul Halim dan Gozalli Ar Rozzaq, *Kontribusi Dan Efektifitas Retribusi Jasa Umum Terhadap Penerimaan pendapatan Asli daerah* (Surakarta: USM, 2009), Hlm. 13-14.

¹¹ Adrian Sutedi, *Hukum Pajak dan retribusi Daerah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), hlm. 74.

berpengaruh dengan minat pengunjung, apabila pungutan yang dikenakan sesuai dengan fasilitas yang diberikan maka akan menimbulkan dampak positif pada tempat rekreasi tersebut.

Namun, beberapa fakta yang ditemui di tempat rekreasi bahwa pungutan yang dikenakan tidak sesuai dengan besaran retribusi/pungutan yang telah ditetapkan, sehingga banyak pengunjung yang merasa kecewa terhadap ketidak konsistenan pungutan tersebut. Hal ini menjadikan kurangnya minat pengunjung dan mengakibatkan pendapatan daerah dari retribusi tempat rekreasi tersebut tidak stabil.

Pemerintah setempat dan masyarakat sekitar sempat bermusyawarah di Sayur Matinggi untuk saling kerja sama agar tidak ada lagi pengutipan di setiap lahan. Setiap pemilik lahan diundang untuk menghadiri rapat tersebut, hasil dari rapat tersebut adalah agar pengutipan digabungkan secara keseluruhan, dengan tujuan untuk menjadi pemasukan daerah. Namun itu hanya sesaat saja, kondisi kembali seperti semula karena para pemilik lahan merasa tidak senang karena pembagian uang tidak adil.¹²

Mengingat pentingnya pelaksanaan Perda untuk menjadikan peraturan tersebut memiliki dayaguna dan hasilguna sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dalam sektor pariwisata sesuai dengan Perda Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga. Berdasarkan latar belakang masalah diatas

¹² Rizka Sari Khairani Harahap, "Potensi Konflik Keberadaan Wisata Aek Sijorni di Desa Aek Libung Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan", *Skripsi*, Universitas Sumatera Utara, 2018, hlm. 16-17.

penulis tertarik untuk membuat karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul ***“Implementasi Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga (Studi Kasus di Aek Sijorni Desa Aek Libung Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan)”***.

B. Fokus Masalah

Agar penelitian ini tidak terlalu luas penelitian ini difokuskan pada Implementasi Pasal 7 Ayat (2) poin a Perda Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 10 Tahun 2006 dan Faktor Penghambat Implementasi Pasal 7 Ayat (2) poin a Perda Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga di Aek Sijorni Desa Aek Libung Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan istilah-istilah yang ada dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Implementasi secara sederhana dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Sebagaimana yang ada di dalam kamus besar bahasa indonesia, implementasi berarti penerapan.
2. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan Perda Kabupaten/Kota Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.¹³

3. Retribusi adalah iuran atau pembayaran kepada negara atau pemerintah oleh setiap orang atau penduduk sebagai warganegara yang menerima atau memperoleh suatu kemudahan dan /atau manfaat dari fasilitas atau jasa yang disediakan atau diproduksi oleh negara atau pemerintah dan dapat dirasakan secara langsung oleh orang atau penduduk tersebut.¹⁴
4. Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah tempat rekreasi pariwisata dan kawasan yang didirikan bangunan yang memiliki fasilitas dari beberapa cabang olahraga yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah atau swasta.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi Pasal 7 Ayat (2) poin a Perda Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 10 Tahun 2006 di Aek Sijorni Desa Aek Libung Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan?
2. Apa faktor penghambat implementasi retribusi tempat rekreasi di Aek Sijorni Desa Aek Libung Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan?

¹³Fauzi Iswahyudi, *Peran Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah* (Medan: Enam Media, 2019), hlm. 71.

¹⁴ Effendi, *Keuangan Negara Suatu Tinjauan Komprehensif Dan Terpadu* (Surabaya: Airlangga University Press, 2017), hlm. 143.

E. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang diajukan mempunyai sasaran yang hendak dicapai atau apa yang menjadi tujuan penelitian. Suatu riset khusus tentang pengetahuan empiris pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran ilmu pengetahuan itu sendiri, adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi perda retribusi tempat rekreasi di Aek Sijorni Desa Aek Libung Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang memadai terutama apabila ditinjau dari dua dimensi manfaat yaitu manfaat Teoritis dan Praktis :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai upaya pengembangan dan kontribusi ilmiah ilmu hukum pada umumnya, khususnya Ilmu Hukum Tata Negara.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah maupun memperdalam dan memperluas khazanah ilmu pengetahuan kepustakaan Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan khususnya Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
- c. Diharapkan dapat menjadi rujukan untuk peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis sebagai tambahan informasi referensi dan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai penerapan perda retribusi yang saat ini berlaku di daerah.
- b. Memberikan pendalaman, pemahaman, dan pengalaman yang baru kepada penulis mengenai permasalahan hukum yang dikaji serta dapat berguna bagi penulis dikemudian hari.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat menggambarkan secara umum dan mempermudah pembahasan dalam penyusunan skripsi ini, maka penyusun menyajikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I adalah bab pendahuluan yang merupakan gambaran umum dari penelitian dan meletakkan masalah tersebut layak untuk diteliti. Bab ini memaparkan latar belakang masalah yang memuat ide-ide, kemudian fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Bab ini diakhiri dengan sistematika pembahasan agar pembahasan ini lebih mudah dipahami.

Bab II merupakan penjelasan tentang penelitian terdahulu dan landasan teori yang mencakup penerapan retribusi tempat rekreasi yang terdiri dari implementasi kebijakan, peraturan daerah kabupaten tapanuli selatan nomor 10 tahun 2006, retribusi daerah, dan retribusi perspektif fiqh siyasah. Hal ini sangat penting untuk memberikan deskripsi yang jelas, sehingga pada pembahasan bab selanjutnya dapat dijadikan gambaran dasar.

Bab III membahas tentang metode penelitian yang mencakup waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan dan analisis data. Bab ini merupakan bab yang akan mengantarkan peneliti untuk mendapatkan data-data penelitian dengan fasilitas yang benar-benar terandalkan dan dapat diuji sedemikian rupa.

Bab IV hasil penelitian merupakan bab yang membahas mengenai Implementasi Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 10 tahun 2006 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Aek Sijorni Desa Aek Libung Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan dan faktor penghambat Implementasi Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 10 tahun 2006 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Aek Sijorni Desa Aek Libung Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan.

Bab V penutup ini berisikan kesimpulan jawaban atas rumusan masalah dan saran-saran penyusun terhadap Implementasi Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 10 tahun 2006 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Aek Sijorni Desa Aek Libung Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung pengkajian serta penelitian yang integral seperti yang di paparkan pada latar belakang masalah, maka penulis melakukan penelusuran dengan beberapa tulisan yang berkaitan yaitu:

1. Skripsi Eka Bella Amalia Putri, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2019, judul “Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga di Kabupaten Tanggamus” dengan kesimpulan Pelaksanaan pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi pada objek wisata di Kabupaten Tanggamus selama ini secara umum sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 02 Tahun 2016. Pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga cukup memadai walaupun masih perlunya peran pemerintah daerah terutama Pemerintah Kabupaten Tanggamus untuk meningkatkan mutu dan kenyamanan bagi pengunjung saat mendatangi lokasi wisata. Sistem pemungutan yang baik akan sangat membantu agar pendapatan retribusi yang diperoleh bisa lebih maksimal. Sistem dan prosedur yang baik akan membuat pihak– pihak yang terkait mengetahui secara rinci tugas dan tanggung jawab sehingga tercipta koordinasi yang baik. Melalui sistem dan prosedur yang baik diharapkan mampu menghindarkan dari kesalahan yang tidak sengaja dilakukan selain itu juga akan bisa mencegah dari kecurangan yang dilakukan oleh

Pemungut Retribusi objek wisata Kabupaten Tanggamus maupun bendahara penerimaan Dinas Pariwisata.¹⁵

2. Skripsi Aqsha Surgana, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2015, dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Terkait Tempat Rekreasi dan Olahraga di Kota Surakarta (Study kasus di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Kota Surakarta)” dengan kesimpulan pelaksanaan peraturan daerah kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah terkait tempat rekreasi dan olahraga sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari tabel Target Realisasi tahun 2011-2014 dinas kebudayaan dan pariwisata kota Surakarta yang menunjukkan pada tahun 2014 pencapaian target terealisasi meskipun pada 3 tahun sebelumnya target tersebut tidak terealisasi. Dilihat dari tabel tersebut, realisasi setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan. Peningkatan realisasi tersebut selaras dengan pembenahan objek retribusi untuk menaikkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi. Sebagai contoh, penambahan fasilitas pendingin ruangan dan LCD proyektor digedung wayang orang yang sebelumnya gedung wayang orang tersebut tidak memiliki fasilitas pendingin ruangan sehingga target 200 orang pengunjung permalam tidak terealisasi.¹⁶

¹⁵Eka Bella Amalia Putri, “Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga di Kabupaten Tanggamus”, *Skripsi*, Universitas Lampung, 2019.

¹⁶Aqsha Surgana, “Implementasi Peraturan Daerah Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Terkait Tempat Rekreasi dan Olahraga di Kota Surakarta (Study kasus di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Kota Surakarta)”, *Skripsi*, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2016.

Dari beberapa judul di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa belum ada yang meneliti tentang retribusi yang dipungut oleh pihak yang tidak berwenang dan belum terlaksananya retribusi yang sah sesuai dengan besaran retribusi yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.

B. Landasan Teori

1. Implementasi Kebijakan

a. Pengertian Implementasi Kebijakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Implementasi yaitu pelaksanaan/ penerapan. Sedangkan pengertian umum dari implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci. Tidak hanya sekedar aktivitas, implementasi merupakan suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius juga mengacu pada norma-norma tertentu guna mencapai tujuan kegiatan.¹⁷

Dalam proses suatu implementasi kebijakan publik akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan (direncanakan) oleh pembuat kebijakan dengan kenyataan apa yang dicapai (hasil yang dicapai). Dalam implementasi kebijakan publik kegagalan atau keberhasilannya dapat dilihat dan diamati dari sudut kemampuan nyata dalam meneruskan

¹⁷ Ismiranto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Tahun 2008.

pelaksanaan program-program sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya.¹⁸

Menurut Mazmanian dan Sabatier diaktualisasi oleh Gustama implementasi kebijakan adalah suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam waktu tertentu dengan menggunakan sarana yang dipilih untuk mencapai tujuan yang dipilih.¹⁹

Implementasi kebijakan lebih mengarah pada suatu proses dimana kebijakan yang telah ada dan yang seharusnya berjalan sesuai yang tertuang dalam kebijakan tersebut apakah sama pelaksanaannya dimasyarakat. Terdapat tujuan dan manfaat dalam kebijakan yang telah dibuat dan bagaimana pelaksanaannya dalam masyarakat yang terjadi. Apakah telah sesuai dengan tujuan dan maksud kebijakan tersebut atau belum. Umat Islam diwajibkan untuk menggali dan mengeluarkan hukum langsung dari sumber utama, yaitu al-Qur'an dan sunnah.²⁰

¹⁸ Sayadi, *Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Retribusi Rekrasi Di Kawasan Objek Wisata Batu Hiu*, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol. 3, No. 3 (2017), hlm. 126.

¹⁹ Prihati, *Implementasi Kebijaksanaan Promosi Pariwisata dalam Pengembangan Potensi Wisata Daerah* (Surabaya: Jakad Publishing, 2018), hlm. 53.

²⁰ Ikhwanuddin Harahap, *Memahami Urgensi Perbedaan Mazhab Dalam Kontruksi Hukum Islam di Era Millenial*, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan, Vol. 5, No. 1 (2019), hlm. 10.

b. Ciri-ciri Kebijakan

Menurut Suharno, ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan. Ciri-ciri kebijakan antara lain:

- 1) Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan. Kebijakan-kebijakan publik dalam sistem politik modern merupakan suatu tindakan yang direncanakan.
- 2) Kebijakan pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri. Kebijakan tidak cukup 26 mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang tertentu, melainkan diikuti pula dengan keputusan-keputusan yang bersangkutan paut dengan implementasi dan pemaksaan pemberlakuan.
- 3) Kebijakan bersangkutan paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang tertentu.
- 4) Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif, kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan

apapun dalam masalah-masalah dimana justru campur tangan pemerintah diperlukan.²¹

c. **Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan**

Menurut Bambang sunggono, implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu:

1) Isi Kebijakan

Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan. Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.

2) Informasi

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan

²¹ Haedar Akib, *Implementasi Kebijakan*, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 1, No. 1 (2010), hlm. 25.

perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

3) Dukungan

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

4) Pembagian potensi

Sebab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantaranya para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksana dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas. Adanya penyesuaian waktu khususnya bagi kebijakan-kebijakan yang kontroversial yang lebih banyak mendapat penolakan warga masyarakat dalam implementasinya.

Menurut James Anderson, faktor-faktor yang menyebabkan anggota masyarakat tidak mematuhi dan melaksanakan suatu kebijakan publik, yaitu:

- 1) Adanya konsep ketidak patuhan selektif terhadap hukum, dimana terdapat beberapa peraturan perundang-undangan atau

kebijakan publik yang bersifat kurang mengikat individu-individu.

- 2) Karena anggota masyarakat dalam suatu kelompok atau perkumpulan dimana mereka mempunyai gagasan atau pemikiran yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan hukum dan keinginan pemerintah.

2. Perda Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 10 Tahun 2006

a. Pengertian Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah.²² Peraturan daerah merupakan wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan pada dasarnya peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan melihat ciri khas dari masing-masing daerah.

b. Kandungan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006

Memahami ilmu perundang-undangan sangatlah penting, seperti salah satunya mematuhi peraturan perundang-undangan tersebut. Berikut ini merupakan paparan peraturan perundang-

²² Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan, Cet. Ke-7* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 202.

undangan yang mengatur tentang besaran retribusi tempat rekreasi dan olahraga: Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 10 Tahun 2006 BAB V tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

1) Pasal 7 Ayat (1) berbunyi, “Atas pemakaian dan pemanfaatan tempat rekreasi dan olahraga akan dikenakan retribusi”.²³

2) Pasal 7 Ayat (2) berbunyi, “Besarnya Retribusi disebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut:

a) Tempat Rekreasi

- a. Untuk setiap kali masuk ke kawasan tempat rekreasi dalam Kabupaten Tapanuli Selatan dipungut retribusi sebagai berikut: a) Orang Dewasa: Rp. 1.000,-/ orang; b) Anak- anak: Rp. 500,-/ orang; c) Kendaraan Roda Dua: Rp. 1.000,-/ unit; d) Kendaraan Roda Empat: Rp. 2.000,-/ unit; e) Kendaraan diatas Roda Empat: Rp. 3.000,-/ unit.
- b. Terhadap aparat Pemerintah yang sedang menjalankan tugas, serta penduduk yang bertempat tinggal di kawasan tempat rekreasi dimaksudkan tidak dikenakan Retribusi.
- c. Setiap orang memasuki Tempat Rekreasi dengan membayar Retribusi diwajibkan masuk melalui tempat masuk yang telah ditentukan.

²³ Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga BAB V.

3. Retribusi Daerah

a. Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi adalah iuran kepada pemerintah daerah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjukkan, paksaan ini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah ia tidak akan dikenai iuran tersebut.²⁴

Kenyataan selama ini menunjukkan Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang diandalkan oleh Pemerintah Daerah, karena obyek dari retribusi daerah sangat luas dan mudah diadakan/ditetapkan dibanding dengan Pajak Daerah dan sumber-sumber pendapatan asli daerah lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Ahmad Yani mengartikan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu

²⁴ Munawir, *Analisa Laporan Keuangan* (Yogyakarta: Liberty, 1995), hlm. 45.

yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.²⁵

Berdasarkan definisi di atas dapat dirangkum bahwa pengertian retribusi daerah yaitu pungutan daerah yang dilakukan oleh pemerintah atas pembayaran jasa atau perizinan tertentu yang diberikan oleh pemerintah untuk memenuhi kepentingan atau tujuan orang pribadi atau badan yang memiliki sifat ekonomis yang memiliki arti siapa saja tidak akan merasakan jasa balik dari pemerintah jika ia tidak dikenakan iuran tersebut.

b. Jenis-jenis Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang menganut sistem *closed list*, menetapkan 30 jenis retribusi daerah yang dapat dipungut oleh provinsi/kabupaten/kota. Jumlah ini bertambah menjadi 32 jenis setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012.

Retribusi daerah dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

1) Retribusi jasa umum adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh

²⁵Rahmat P. Labaeni, dkk, “Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (Studi di Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi Kota Kotamobagu)”. Jap. Vol. 3, No. 31 (2005), hlm. 4.

orang pribadi atau badan. Berikut ini adalah jenis-jenis retribusi jasa umum:

- a) Retribusi Pelayanan Kesehatan
 - b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
 - c) Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil
 - d) Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat
 - e) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
 - f) Retribusi Pelayanan Pasar
 - g) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
 - h) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
 - i) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
 - j) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
 - k) Retribusi Pengolah Limbah Cair
 - l) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
 - m) Retribusi Pelayanan Pendidikan
 - n) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
 - o) Retribusi Pengendalian Lalu Lintas.
- 2) Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:
- a) Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau

- b) Pelayanan oleh pemerintah daerah belum dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Berikut ini adalah jenis-jenis retribusi jasa usaha:

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
3. Retribusi Tempat Pelelangan
4. Retribusi Terminal
5. Retribusi Tempat Khusus Parkir
6. Retribusi Tempat Penginapan/Pesangrahan/Villa
7. Retribusi Rumah Porong Hewan
8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
10. Retribusi Penyebrangan di Air
11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.²⁶

- 3) Retribusi perizinan tertentu adalah pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Berikut ini adalah jenis-jenis retribusi perizinan tertentu:

- a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

²⁶Aqsha Surgana, *Op. Cit.*, hlm. 23-24.

- b) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- c) Retribusi Izin Gangguan
- d) Retribusi Izin Trayek
- e) Retribusi Izin Usaha Perikanan
- f) Retribusi Perpanjangan Izin Memperkejakan Tenaga Asing (IMTA).

c. Tarif dan Prinsip Retribusi Jasa Usaha

Tarif Retribusi Jasa Usaha, didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Keuntungan yang layak adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Kegagalan menetapkan retribusi secara tepat dapat menyebabkan distorsi harga relatif dan masalah serius berkaitan dengan kesalahan alokasi sumber daya (pemborosan) dan mengurangi pilihan konsumen. Dalam prakteknya dari sudut pandang administrasi, pertimbangan sosial dan politik memiliki peranan yang lebih besar dibandingkan dengan ekonomi efisiensi. Namun, gagal dalam menetapkan retribusi atas pelayanan publik merupakan penyebab utama defisit fiskal di beberapa negara miskin. Begitu juga sifat kehati-hatian yang dianjurkan oleh Islam untuk menghindari efek yang datang belakangan.²⁷

²⁷Syapar Alim Siregar, *Keringanan Dalam Hukum Islam*, Jurnal El-Qanuny : Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial, Vol. 5, No. 2 (2019), hlm. 294.

Para ahli, umumnya menentukan tarif/harga berdasarkan biaya marjinal, yaitu harga yang dibebankan harus sama dengan biaya marjinal (biaya khusus) untuk melayani konsumen. Harga inilah yang sesuai apabila terdapat pasar kompetitif atas pelayanan tersebut. Harga ini disebut sebagai harga ekonomis efisien, karena hargalah yang akan memaksimalkan manfaat ekonomi dan penggunaan terbaik atas sumber daya (asumsi faktor lain dianggap sama). Karenanya, masyarakat memperoleh keuntungan dari peningkatan output atas barang atau jasa sampai pada titik di mana biaya marjinal sama dengan harga.

Prinsip harga berdasarkan biaya marjinal adalah prinsip yang umum digunakan dalam pasar uang kompetitif (misalnya, harga di restoran, biaya menyewa kendaraan, biaya telepon, dan lain-lain).

d. Perspektif Fiqh Siyasah tentang Retribusi

Fiqh Siyasah adalah ilmu yang mempelajari hal-hwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.²⁸

Untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia di dunia, Allah SWT. Telah menyediakan bumi, langit, dan segala yang adadi

²⁸ Wahyu Abdul Jafar, “*Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Al-Hadist*”, Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 3 No. 1, (2018) hlm. 20.

dalamnya. Oleh karena itu, segala yang dimiliki oleh manusia di dunia ini pada hakikatnya adalah milik Allah. Hal ini menyadarkan manusia bahwa harta kekayaan yang ada pada tangannya sebagai hasil dari *kasb al-halal* adalah rezeki dari Allah yang wajib disyukuri.²⁹

Selain itu, Allah tidak hanya memberi rezeki kepada manusia, tetapi juga menugasi manusia untuk memosisikan diri sebagai *khalifah fi al-ardh* dalam rangka memamurkan kehidupan dunia ini. Manusia memiliki peluang yang sama untuk mencapai tingkat hidup yang makmur. Akan tetapi, karena berbagai alasan, tingkat kemakmuran yang dicapai manusia tidak selalu sama: ada yang kaya dan ada yang miskin. Sehubungan dengan itu, ajaran Islam mengupayakan agar harta tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja.

Dengan demikian, maka prinsip *tawhidullah*, prinsip ke-*khalifah*-an manusia yang mengemban amanat Allah di muka bumi ini, harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Prinsip keadilan menjadi acuan utama dalam pemberdayaan ekonomi umat.

Adapun tujuan yang harus dicapai adalah menciptakan *maqashid al-syariah*. Sebagaimana telah dimaklumi, para ulama mengusulkan lima *maqashid al-syariah*, sebagai hasil penelitian

²⁹ H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 250.

mereka terhadap *nash-nash* Al-Qur'an dan Hadis, yaitu: *hifdh al-din*, *hifdh al-nafs*, *hifdh al-'aql*, *hifdh al-mal*, dan *hifdh al-nasl*.

Ada beberapa macam fiqh siyasah dari berbagai pendapat diantaranya fiqh siyasah dusturiyah, fiqh siyasah maliyah dan fiqh siyasah dauliyah. Penjelasan fiqh siyasah yang berkaitan dengan retribusi adalah fiqh siyasah maliyah. Siyasah maliyah merupakan aspek sangat penting dalam mengatur pemasukan dalam pengeluaran keuangan untuk kemaslahatan masyarakat. Pengelolaan kekayaan Negara/Daerah sudah dikenal sejak tahun kedua hijriah sejak pemerintahan Islam di Madinah. Masa Rasulullah SAW (1-11H/622-632M) ketika kaum muslimin mendapatkan ghanimah (harta rampasan perang) pada perang badar pada saat itu para sahabat berselisih paham mengenai cara pembagian ghanimah, sehingga turun firman Allah yang menjelaskan hal tersebut, turunlah surat Al-Anfal ayat 41.

﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلْنَا عَلَىٰ
عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ أَجْمَعِينَ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

Ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, Maka Sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, Kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, Yaitu di hari bertemunya dua pasukan. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.³⁰

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Al-Huda, 2005), hlm. 182.

Setelah turunnya ayat itu Rasulullah mendirikan Baitul Maal yang mengatur setiap harta benda kaum muslimin baik harta yang keluar maupun harta yang masuk bahkan Rasulullah sendiri menyerahkan segala urusan keuangan Negara kepada lembaga keuangan ini. Sistem pengelolaan keuangan Negara saat itu masih sangat sederhana, sehingga harta benda yang masuk langsung habis dibagi-bagikan kepada kaum muslimin yang berhak mendapatkannya, atau dibelanjakan untuk keperluan umum. Perbaikan pengelolaan keuangan Negara terjadi dimasa Khalifah Abu Bakar al-Siddiq dimana khalifah pertama ini menekankan pentingnya fungsi Baitul Maal sebagai pengelola keuangan Negara. Adapun sumber-sumber dari keuangan Negara berasal dari *zakat*, *wakaf*, *jizyah* (pembayaran dari non-muslim untuk menjamin perlindungan keamanan), *Kharraj* (pajak atas tanah atau hasil tanah).³¹

Sumber kekayaan Negara hanya memiliki dua sumber yang pasti, yaitu *fai'* (upeti) dan *sedekah* (zakat). *Fai'* ialah harta yang diperoleh dari musuh non muslim bukan melalui peperangan, tetapi melalui perdamaian. Termasuk dalam dalam kelompok harta *Fai'* antara lain *jizyah* (pajak khusus yang dipungut dari non muslim), *kharaj* (pajak tanah) dan *hibah* (harta warisan kaum dzimi yang tidak mempunyai ahli waris). *Fai'* termasuk hak Baitul Maal karena

³¹ Yusuf Qardhawy, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1988), hlm. 743.

pendistribusiannya tergantung pada pertimbangan dan ijtihad pemimpin Negara. Sejak zaman Khalifah Muawiyah (661-680 M) pada masa pemerintahan Sasanid, orang yang bertugas mengumpulkan pajak tanah diistilahkan dengan *jihbiz*.³²

Dalam kerangka pemenuhan kebutuhan material individu dan masyarakat, ajaran Islam mendorong manusia muslim untuk bekerja keras. Terdapat berbagai isyarat dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi yang menunjukkan jalan-jalan untuk bekerja, misalnya:

- 1) Pertanian, Peternakan.
- 2) Industri, baik industri pakaian, industri besi, ataupun industri bangunan.
- 3) Perdagangan.
- 4) Industri kelautan.
- 5) Jasa.

³² Adiwarman A karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), hlm. 21.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Aek Sijorni Desa Aek Libung Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan. Adapun waktu penelitian ini dimulai dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan September. Adapun alasan peneliti, meneliti di Aek Sijorni karena di Aek Sijorni terdapat masalah yang retribusi tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Maka dari itu peneliti tertarik meneliti di lokasi tersebut.

B. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, menurut Lexy J. Moleong metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya *perilaku, persepsi, motivasi, tindakan* dan lain-lainnya. Secara *holistik* dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah.³³

Berdasarkan penjelasan di atas, kualitatif adalah jenis penelitian yang terjun langsung kelapangan tanpa perantara dengan cara mewawancarai langsung masyarakat yang berada di tempat yang ingin di wawancarai. Dengan begitu maka akan diperoleh hasil yang di inginkan untuk kepentingan tugas atau keperluan yang dibutuhkan akan membantu untuk menyelesaikannya. Dalam penelitian kualitatif data secara terus menerus

³³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 6.

dianalisis sejak aktivitas penelitian dikerjakan. Kegiatan analisis data mencakup kegiatan dengan data, pengelompokan data memilih dan memilah, mencari pola dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari kemudian memutuskan apa yang akan dipaparkan kepada orang lain.³⁴

C. Subjek Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Pasal 7 Ayat (2) poin a Perda Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga di Aek Sijorni dan Faktor Penghambat yang dihadapi dalam mengimplementasikan Perda tersebut.

Sejalan dengan hal tersebut, maka yang menjadi subjek penelitian ini adalah Kepala Dinas Parawisata Tapanuli Selatan, Masyarakat Aek Libung dan Pengunjung Aek Sijorni.

D. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian *kualitatif* ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik.³⁵

³⁴Sawaluddin Siregar, *Hakikat kuliah kerja lapangan dan perubahan Masyarakat*, Jurnal Al-Maqasid : Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan, Vol. 5, No. 2 (2019), hlm. 230.

³⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 90.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber utama.³⁶ Kemudian dituangkan kedalam bentuk tulisan sebagai tanda bahwasanya sudah diminta argumen dari orang tersebut.

a. Wawancara, metode wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Wawancara yang digunakan yaitu wawancara terstruktur dimana pewawancara menentukan sendiri masalah dan pertanyaan yang akan diajukan oleh peneliti. Adapun informan yang diwawancarai peneliti adalah:

- 1) Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Selatan, dimana bertanggung jawab mengenai pengelolaan Tempat Rekreasi dan Olahraga di Kabupaten Tapanuli Selatan.
- 2) Masyarakat Aek Libung, karena sebagian masyarakat merupakan pemilik lahan yang berada disekitar aek sijorni, yang kemudian para pemilik melakukan pemungutan yang tidak resmi di aek sijorni.
- 3) Pengunjung Aek Sijorni, karena para pengunjung tidak merasakan kenyamanan atas kunjungannya ke aek sijorni. Banyak pengunjung yang kecewa atas pungutan tidak resmi yang dipungut oleh masyarakat setempat.

³⁶ Amiruddin dan Zainal Arisikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), hlm. 30.

- b. Dokumentasi, teknik ini merupakan cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- c. Studi Kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari buku, karya ilmiah, jurnal, internet, peraturan-peraturan, pendapat para ahli yang terkompetensi, serta memiliki dengan masalah yang diteliti.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber Data sekunder yaitu data yang diambil sebagai penunjang tanpa harus terjun kelapangan, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.³⁷ Yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai *otoritas*. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undang, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer penelitian ini terdiri dari:

- 1) Al-Qur'an.
- 2) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 31.

- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua *publikasi* tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. *Publikasi* tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan Pengadilan.³⁸ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini diantaranya:

- 1) Hukum Pajak dan Retribusi Daerah, karya Adrian Sutedi.
- 2) Peran Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah, karya Fauzi Iswahyudi.
- 3) Implementasi Kebijakan Promosi Pariwisata dalam Pengembangan Potensi Wisata Daerah, karya Prihati.
- 4) Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Retribusi Rekreasi di Kawasan Objek Wisata Batu Hiu, karya Sayadi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berfungsi menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 141.

Dalam hal ini, bahan hukum tersier pada penelitian ini diantaranya:

- 1) Kamus Hukum, karya J.C.T. Simorangkir, dkk.
- 2) Kamus Arab-Indonesia, karya Mahmud Yunus.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah metode di mana peneliti mengamati langsung obyek yang diteliti. Ada dua jenis observasi, *pertama*, observasi partisipan, yaitu peneliti ikut berpartisipasi sebagai anggota kelompok yang diteliti. *Kedua*, observasi non partisipan, yaitu observasi di mana peneliti tidak memposisikan dirinya sebagai anggota kelompok yang diteliti.³⁹

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan observasi non partisipan dimana peneliti akan bersifat netral dengan tidak memposisikan diri sebagai kelompok informan yang akan diteliti.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode penelitian di mana peneliti melakukan kegiatan wawancara tatap muka secara mendalam dan terus menerus menggali informasi dari informan. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan alasan detail dari jawaban informan yang antara lain

³⁹ M. Hariwijaya, *Metodologi dan Penulisan Skripsi, Tesis Dan Desertasi Untuk Ilmu Sosial dan Humanior*, (Yogyakarta: Parama Ilmu, 2007), hlm. 90.

mencakup opininya, motivasinya, nilai-nilai ataupun pengalaman-pengalamannya.⁴⁰

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara langsung dengan Kepala Dinas Pariwisata Dan Kepala Seksi Bagian Promosi Objek Wisata Kabupaten Tapanuli Selatan, Masyarakat dan Pengunjung Aek Sijorni yang terlibat dalam aktivitas kunjungan di Aek Sijorni Kabupaten Tapanuli Selatan untuk lebih mengetahui tentang pelaksanaan pungutan retribusi di Aek Sijorni. Dengan begitu peneliti memperoleh jawaban yang dibutuhkan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seorang *klien* melalui catatan pribadinya.⁴¹ Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan artefak dan foto.⁴²

F. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis kualitatif.

Dalam penelitian kualitatif data diperoleh dari berbagai sumber, dengan

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 89.

⁴¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 112.

⁴² Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), hlm. 155-156.

menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam. Analisis kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.⁴³ Adapun langkah-langkah dan teknik yang akan diperoleh untuk menganalisis data kualitatif akan dijelaskan sebagai berikut:

1. *Editing data*, yaitu menyusun redaksi data menjadi susunan kalimat yang *sistematis*.
2. *Reduksi Data*, yaitu memeriksa kelengkapan data untuk mencari yang masih kurang dan mengesampingkan yang tidak *relevan*.
3. *Mendeskripsikan* data secara *sistematis* yang dikaitkan dengan data hasil pengolahan secara *kualitatif* sesuai dengan topik-topik pembahasan.
4. Penarikan Kesimpulan, yaitu merangkum semua uraian data dalam beberapa kalimat yang didalamnya pengertian secara singkat, padat dan jelas.⁴⁴

G. Metode Uji Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.⁴⁵

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 243-245.

⁴⁴ Lexy J. Moleong, *Op.Cit.*, hlm. 178.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 320.

data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.⁴⁶ Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data.

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Elfabeta, 2007), hlm. 270.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Selatan

a. Sejarah Berdirinya Kantor Pariwisata Tapanuli Selatan

Kehadiran UU Perda No.7 Tahun 2007 Pasal 37 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah telah memacu pemerintah dan masyarakat untuk mendirikan Kantor Pariwisata Kabupaten Tapanuli Selatan Sumatera Utara.

Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Selatan yang selama ini bergabung dengan Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan, dibentuk berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2007 Pasal 37 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah, berbentuk Kantor, serta ditegaskan juga penyusunan uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Jabatan Struktural Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Daerah Tapanuli Selatan.

Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki potensi sumber daya alam yang memberikan kontribusi besar terhadap PDRB Kabupaten Tapanuli Selatan terutama sektor pariwisata. Dimana potensi pariwisata di Tapanuli Selatan ini sangat beragam namun selama ini belum dimanfaatkan secara optimal, maka dari itulah terjadi pembentukan kantor pariwisata dan kebudayaan Tapanuli Selatan yang bertugas untuk menggali dan melestarikan potensi pariwisata,

baik yang direalisasikan maupun yang belum sama sekali direalisasikan serta menginformasikan tentang pariwisata dan kebudayaan di Kabupaten Tapanuli Selatan kepada khalayak ramai dan masyarakat/ pengunjung yang ingin menikmati wisata dan liburan di Kabupaten Tapanuli Selatan.

b. Struktur Organisasi Kantor Pariwisata Kabupaten Tapanuli Selatan

Organisasi adalah suatu bentuk kerja sama dari sejumlah orang dalam suatu wadah tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Struktur organisasi perusahaan merupakan kerangka pembagian tugas dan tanggung jawab fungsional yang berperan menjalankan aktifitas perusahaan. Melalui struktur organisasi yang jelas.

Dengan adanya struktur organisasi ini diharapkan setiap pegawai mengetahui dengan jelas tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan serta dapat mempertanggung jawabkan kepada atasan dan atasan akan mengetahui bagaimana mendelegasikan wewenang kepada bawahannya, sehingga setiap aktifitas bawahan dapat terselenggarakan dengan baik dan terkoordinasi.

Berikut merupakan Struktur Organisasi Kantor Pariwisata Kabupaten Tapanuli Selatan:

- 1) Kepala Dinas Pariwisata : Abdul Saftar Harahap, S.Sos, MM
- 2) KASUBAG Umum : Abdul Hasyim Siregar, S.Sos
- 3) KASUBBAG Program : Maya Sari Siregar, Am.d

- 4) KASI PP objek : Ir. Syaiful Bahri Siregar
- 5) KASI Promosi objek wisata : Ahmad Fauzi, S.Kom.MM

c. Visi dan Misi Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Selatan

1) Visi Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Selatan

Mewujudkan Destinasi Pariwisata yang Berwawasan Lingkungan dan Lestari serta Membangun Pemuda dan Olahraga yang Unggul.

2) Misi Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Selatan

- a) Mewujudkan Destinasi Pariwisata dan Mengembangkan Objek Wisata yang ada dengan berwawasan lingkungan dan Melestarikan Kesenian Daerah.
- b) Mengembangkan Kegiatan-kegiatan Positif yang memfasilitasi Pengembangan Bakat dan Minat Generasi Muda dalam bidang Kepemudaan, Kewirausahaan, Kepeloporan Pemuda serta Kebangsaan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam kerangka NKRI.
- c) Meningkatkan Budaya dan Prestasi Olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan melalui tahap Pengenalan Olahraga, [Pemanduan, Pengembangan Bakat, Peningkatan Prestasi serta Pemantauan Bakat.

2. Profil Desa Aek Libung

Dalam penelitian ini, penulis mengungkapkan hasil wawancara tentang Profil Desa Aek Libung kecamatan Sayur Matinggi kabupaten Tapanuli Selatan.

TABEL I
JUMLAH PENDUDUK DESA AEK LIBUNG KECAMATAN SAYUR
MATINGGI

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH JIWA
1	Laki-laki	1.017
2	Perempuan	1.030
JUMLAH		2.047

Sumber: Data Kantor Desa Aek Libung, 2020.

Jumlah penduduk di desa Aek Libung kecamatan Sayur Matinggi kabupaten Tapanuli Selatan berjumlah 2.047 jiwa yang terdiri dari 1.017 laki-laki, 1.030 perempuan dan terdiri dari 508 kepala keluarga.

Secara geografis desa Aek Libung kecamatan Sayur Matinggi kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara yang luas wilayahnya adalah 2 KM. Untuk lebih mengenal desa Aek Libung kecamatan Sayur Matinggi memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Bukit Barisan.
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Talakma.
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Silaiya.
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sayurmatinggi.

1) Keadaan Mata Pencarian Penduduk

Mengenai mata pencarian yang merupakan sarana pokok bagi masyarakat desa Aek Libung kecamatan Sayur Matinggi didominasi sektor Pertanian. Untuk lebih jelasnya sebagaimana terdapat pada tabel berikut:

TABEL II
KEADAAN MATA PENCAHARIAN PENDUDUK DESA AEK
LIBUNG KECAMATAN SAYUR MATINGGI

NO	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH JIWA	PERSENTASE
1	Petani	982	48%
2	Pedagang	470	23%
3	PNS	266	13%
4	Karyawan Swasta	102	5%
5	Tidak Bekerja	227	12%
JUMLAH		2.047	100%

Sumber: Data Kantor Desa Aek Libung, 2020.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mata pencaharian masyarakat desa Aek Libung kecamatan Sayur Matinggi kabupaten Tapanuli Selatan yang paling banyak adalah sebagian besar petani.

2) Keadaan Keagamaan Penduduk

Bila dilihat dari segi agama, masyarakat desa Aek Libung kecamatan Sayur Matinggi keseluruhan masyarakatnya menganut agama Islam. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL III
KEADAAN KEAGAMAAN PENDUDUK DESA AEKLIBUNG
KECAMATAN SAYUR MATINGGI

NO	AGAMA	JUMLAH JIWA	PERSENTASE
1	Islam	2.047	100%
2	Kristen	-	-
3	Khatolik	-	-
4	Hindu	-	-
5	Budha	-	-
6	Konghuchu	-	-
JUMLAH		2.047	100%

Sumber: Data Kantor Desa Aek Libung, 2020.

Apalagi desa Aek Libung kecamatan Sayur Matinggi mayoritas memeluk agama Islam. Agama merupakan fitrah manusia, sehingga setiap manusia membutuhkan agama sebagai pedoman dan penuntun dalam kehidupannya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik dunia maupun akhirat.

Dalam rangka melaksanakan ajaran agama, sarana ibadah adalah hal terpenting, dengan adanya rumah ibadah di desa Aek Libung kecamatan Sayur Matinggi kabupaten Tapanuli Selatan. Adapun sarana ibadah di desa Aek Libung kecamatan Sayur Matinggi adalah berjumlah 3.

3) Keadaan Pendidikan Penduduk

Sedangkan masalah pendidikan di desa Aek Libung kecamatan Sayur Matinggi dapat dilihat dari tabel berikut:

TABEL IV
KEADAAN PENDIDIKAN PENDUDUK DESA AEK LIBUNG
KECAMATAN SAYUR MATINGGI

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	PERSENTASE
1	S1	20%
2	SMA	45%
3	SMP	25%
4	SD	5%
5	Tidak Sekolah	5%
JUMLAH		100%

Sumber: Data Kantor Desa Aek Libung, 2020.

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa penduduk desa Aek Libung kecamatan Sayur Matinggi, tingkat pendidikan perguruan tinggi (S1) 20% tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) 45% tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 25% tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) 5% dan Tidak Sekolah sebanyak 5%.

B. Implementasi Perda Retribusi

Berikut peneliti paparkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan yang berkenaan dengan Implementasi Perda Retribusi Tempat Rekreasi di

Aek Sijorni desa Aek Libung kecamatan Sayur Matinggi kabupaten Tapanuli Selatan.

1. Pelaksanaan Retribusi

Mengenai pelaksanaan retribusi Pemerintah Daerah telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Pasal 7 ayat (2) Perda Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga bahwa untuk setiap kali masuk ke kawasan tempat rekreasi dalam Kabupaten Tapanuli Selatan dipungut retribusi sebagai berikut: a) Orang Dewasa: Rp. 1.000,-/ orang; b) Anak- anak: Rp. 500,-/ orang; c) Kendaraan Roda Dua: Rp. 1.000,-/ unit; d) Kendaraan Roda Empat: Rp. 2.000,-/ unit; e) Kendaraan diatas Roda Empat: Rp. 3.000,-/ unit.

Namun pada kenyataannya, retribusi yang dipungut tidak mengacu pada besaran retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 10 Tahun 2006. Seperti halnya banyak titik pengutipan retribusi tidak resmi yang dilakukan oleh pemuda setempat dan rusaknya jalan yang harus dilalui pengunjung untuk menuju ketempat rekreasi.

Kebijakan Retribusi Aek Sijorni telah dilakukan Dinas Pariwisata sesuai dengan Peraturan Daerah. Retribusi yang dikutip di Aek Sijorni seharusnya hanya ada satu kutipan sebesar Rp. 2000,- per orang, kutipan tersebut dikutip dirambin (jembatan) yang dibangun oleh Pemerintah Daerah dan juga Dinas Pariwisata telah menyiapkan karcis bagi setiap pengunjung yang datang. Retribusi tersebut dikutip berdasarkan hasil kesepakatan Pemerintah dengan Masyarakat setempat dan juga berdasarkan kesepakatan pengutipan retribusi dilakukan oleh pemuda setempat. Kemudian hasil kutipan retribusi tersebut dilaporkan kepada Pemerintah, tetapi laporan tersebut jarang didapatkan Pemerintah dari Pemuda yang

mengutipnya. Ketika karcis habis pun mereka tidak ada yang datang melaporkannya.⁴⁷

Sedangkan berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 12 tahun 2019, besarnya penyesuaian tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut: untuk setiap kali masuk ke kawasan tempat rekreasi dalam kabupaten Tapanuli Selatan dipungut retribusi sebagai berikut: 1) Orang Dewasa: Rp. 5.000,-/ Orang, 2) Anak-anak: Rp. 3.000,-/ Orang, 3) Kendaraan Roda dua: Rp. 5.000,-/Unit, 4) Kendaraan Roda Empat: Rp. 7.500,-/ Unit, 5) Kendaraan diatas Roda Empat: Rp. 10.000,-/ Unit.

Pelaksanaan retribusi yang dilakukan sungguh tidak konsisten karena pada awal tahun 2020 tepatnya bulan Januari, Pemerintah Daerah dan Dinas Pariwisata telah menegaskan bahwa untuk memasuki Aek Sijorni bebas pungutan. Tetapi kenyataannya ketika kami mengunjungi Aek Sijorni masih banyak lagi pengutipan yang dilakukan. Menurut pengunjung pemerintah tidak bertindak setegas apa yang dikatakan, yang menyebabkan pungutan hanya sebatas iming-iming untuk menarik minat pengunjung.⁴⁸

Adapun besaran retribusi yang telah disepakati bersama berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 556/ 357/ 2017 tentang Pengutipan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga terdapat pada Pasal 2 yang berbunyi “*Dalam pengutipan diperlukan Karcis berupa tiket masuk ke Kawasan tempat rekreasi dipungut retribusi sebesar Rp. 2000,- (Dua Ribu Rupiah)/ Orang*”. Namun perjanjian ini tidak terlaksana dengan baik karena pada saat musyawarah, masyarakat yang hadir bukan masyarakat

⁴⁷ Wawancara dengan Ahmad Fauzi, Kepala Seksi Promosi Objek Wisata Kabupaten Tapanuli Selatan, tanggal 21 Agustus, 2020.

⁴⁸ Wawancara dengan Rosa Aulya Harahap, Pengunjung, tanggal 25 Agustus, 2020.

yang lahannya dijadikan jalur untuk menuju tempat rekreasi sehingga menimbulkan pertentangan dari para masyarakat yang lahannya yang dijadikan jalur menuju tempat rekreasi.

Retribusi yang dikutip di Aek Sijorni tidak hanya pada satu tempat tetapi retribusi dikutip disetiap lahan milik masyarakat yang dilewati oleh para pengunjung. Biasanya besaran retribusi yang dikutip berbeda-beda tergantung kesepakatan pengutip dengan pengunjung jika rombongan, tetapi biasanya pengutip mematok besaran retribusi sebesar Rp. 2000,- per orang. Beliau juga mengatakan bahwa memang pernah ada kesepakatan antara Pemerintah dan Masyarakat setempat untuk menyatukan keseluruhan kutipan retribusi yang ada disepanjang jalan menuju tempat rekreasi, tetapi kesepakatan tersebut tidak berlangsung lama, hanya berjalan sebentar sekitar satu bulan. Hal tersebut dikarenakan beliau dan para Pemilik Lahan lainnya yang memang tanahnya/lahannya dijadikan jalan merasa tidak mendapatkan keadilan dari kesepakatan tersebut, beliau mengatakan *“tanoh nai do nadibaen dalam lewat, giot dibagi busema hasilna 50% dipemerintah dohot 50% di sude na adong tanoh na di son padahal anggo sego dalam i tanoh nami do, nahona paturena pe hami do nangge halai, nangge dohot paturena polama ra hami bagi rata.”* (Jalan kaminya yang dijadikan jalan lewat, mau dibagi juga hasilnya (kutipan retribusi) 50% ke pemerintah dan 50% lagi ke seluruh pemilik lahan yang ada disini padahal kalau rusak jalan itu tanah kami, yang memperbaiki juga kami bukan mereka, mereka tidak ikut memperbaikinya jadi kami tidak mau bagi rata).⁴⁹

Sedangkan ada juga pengunjung yang lebih memilih membatalkan rekreasinya ke Aek Sijorni karena perlakuan yang tidak menyenangkan dari para pengutip yang merasa memiliki kuasa atas jalur Aek Sijorni.

Pengunjung sudah sering ke Aek Sijorni bersama teman-temannya untuk berekreasi, namun ketika memasuki kawasan Aek Sijorni pengunjung merasa kesal dan tidak nyaman karena setiap langkah selalu diberhentikan oleh pemuda setempat untuk membayar uang masuk, sebenarnya pengunjung tidak merasa keberatan atas kutipan yang ada tapi sebaiknya kutipan dilakukan disatu titik saja.

⁴⁹ Wawancara dengan Rosidah Pulungan, *Pemilik Lahan*, tanggal 25 Agustus, 2020.

Sehingga pengunjung seringkali adu mulut dengan para pengutip disana yang ahirnya menimbulkan pertengkaran.⁵⁰

Sedangkan ada sebagian pemilik lahan yang tidak melakukan pengutipan.

Pemilik Lahan tidak ingin melakukan pengutipan ke setiap pengunjung yang datang karena beliau merasa jika pengutipan dilakukan dibanyak tempat akan membuat kesal para pengunjung dan akan mengurangi minat para pengunjung untuk kembali berkunjung ke Aek Sijorni. Beliau juga mengatakan “*Songonima tu hami napala akkon mambayar lewat*” (Begitulah sama kami tidak harus membayar kalau lewat).⁵¹

2. Sikap Pengunjung terhadap Retribusi

Tempat rekreasi merupakan tempat yang dituju untuk berlibur atau bisa dikatakan untuk menghilangkan rasa suntuk agar menimbulkan rasa senang pada tiap-tiap orang. Namun, ada beberapa perbedaan sikap yang ditunjukkan oleh para pengunjung.

Pengunjung merasa kurang nyaman ketika berkunjung ke Aek Sijorni karena terlalu banyak kutipan yang dikenakan disepanjang jalan. Sebenarnya pengunjung tidak keberatan jika dikenakan retribusi tapi sebaiknya retribusi dipungut pada satu tempat saja agar tidak membuat para pengunjung merasa jengkel dan tidak ingin kembali berkunjung ke Aek Sijorni.⁵²

Ada juga pengunjung yang merasa baik-baik saja atas retribusi yang dipungut.

Pengunjung sering kali tidak membayar kutipan dengan alasan pengunjung tidak memiliki uang untuk membayar pungutan, ketika pengutip memaksa pengunjung untuk membayar, pengunjung langsung memberikan alasan bahwa pengunjung memiliki saudara

⁵⁰ Wawancara dengan Lili Rahmawati Siregar, *Pengunjung*, tanggal 18 Agustus, 2020.

⁵¹ Wawancara dengan Patisa Nasution, *Pemilik Lahan*, tanggal 25 Agustus, 2020.

⁵² Wawancara dengan Rosa Aulya Harahap, *Pengunjung*, tanggal 25 Agustus, 2020.

salah satu pemilik lahan di Aek Sijorni sehingga mereka tidak dikenakan retribusi.⁵³

Sedangkan di sisi lain ada juga pengunjung yang merasa jengkel dan lebih memilih pulang mencari tempat rekreasi lain. Apabila hal tersebut sering terjadi akan membuat turunnya pendapatan masyarakat yang ada di Aek Sijorni.

Aek Sijorni adalah tempat rekreasi yang bagus, cantik, cocok untuk bersenang-senang bersama keluarga. Pada saat pengunjung melewati rambin (jembatan) pengutip mengatakan ada 2 (dua) titik pengutipan lagi, tapi ternyata kutipan tersebut lebih dari 2 (dua) titik sehingga pengunjung memutuskan untuk turun kembali untuk menanyakan hal tersebut yang akhirnya menimbulkan perdebatan yang menjadikan para pengunjung pulang dan mencari destinasi wisata lain.⁵⁴

3. Konflik Pelaksanaan Retribusi

Setiap pelaksanaan kebijakan tentu saja terdapat pro-kontra yang terjadi sehingga mengurangi kenyamanan pengunjung saat mengunjungi Aek Sijorni.

Pengunjung pernah bertengkar dengan para pengutip yang berada di rambin (jembatan) yang dibangun oleh Pemerintah Daerah. Karena seharusnya di rambin (jembatan) tersebut tidak ada retribusi yang dikenakan mereka meminta dengan cara yang kasar dan menyuruh pengunjung mencari jalan lain untuk dilewati akhirnya pengunjung memilih untuk pulang tanpa mengatakan sepatah kata lagi.⁵⁵

C. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Retribusi

Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Retribusi sebagai berikut:

⁵³ Wawancara dengan Riyan Hidayat Lubis, *Pengunjung*, tanggal 25 Agustus, 2020.

⁵⁴ Wawancara dengan Indri Lestari Pasaribu, *Pengunjung*, tanggal 18 Agustus, 2020.

⁵⁵ Wawancara dengan Lili Rahmawati Siregar, *Pengunjung*, tanggal 18 Agustus, 2020.

1. Status Kepemilikan Lahan Menuju Aek Sijorni

Mengenai jalur yang dilewati untuk menuju tempat rekreasi adalah lahan milik masyarakat, sehingga masyarakat dengan sesuka hati mengenakan kutipan pada setiap pengunjung, walaupun tempat mereka mengutip bukan lahan milik mereka.

Masyarakat setempat tidak ada yang ingin menghibahkan tanahnya untuk dikembangkan Pemerintah Daerah agar dibangun jalan yang lebih baik menuju keatas (Air terjun). Meskipun lahan di sekitar tempat rekreasi adalah milik masyarakat tetapi didalam lingkungan Aek Sijorni ada bangunan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah dan Dinas Pariwisata seperti rambin (jembatan) dan Tembok Beton sebagai pembatas dan rambin (jembatan). Untuk saat ini Dinas Pariwisata hanya sebagai pembina masyarakat Aek Libung agar objek wisata yang ada didaerah tersebut dapat dikelola dan di kembangkan dengan baik sesuai dengan peraturan dan keadaan daerah tersebut.⁵⁶

Salah satu pemilik lahan juga mengatakan bahwa “Dari masa opung kami hingga sekarang (generasi ketiga) tanah ini milik kami (Aek Sijorni) tidak ada kaitannya ataupun campur tangan pemerintah atas Aek Sijorni, dari tahun 1990 kami sudah mengutip sebesar Rp. 100,-/ orang.

2. Pola Pikir Masyarakat yang Masih Terbelakang

Dinas Pariwisata telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengembangkan objek wisata yang ada.

Aek sijorni merupakan tempat rekreasi yang memalukan bagi saya dan dinas pariwisata karena di Aek Sijorni terdapat pungutan terpanjang dan parkir termahal sehingga merusak citra objek wisata di tapanuli selatan. Saya sudah mencoba meng-cut atau menstabilkan pungutan di aek sijorni untuk sementara. Saya mengajak masyarakat berdiskusi untuk mencari solusi, menampung saran dan harapan masyarakat untuk kedepannya. Namun pungutan

⁵⁶ Wawancara dengan Ahmad Fauzi, Kepala Seksi Bidang Promosi Objek Wisata Kabupaten Tapanuli Selatan, tanggal 21 September, 2020.

hanya bisa dikosongkan walaupun hanya sekitar satu bulan. Setelah itu pungutan yang dipungut masyarakat kembali lagi dilakukan sehingga banyak pengunjung yang merasa kecewa.⁵⁷

Menurut salah satu pemilik lahan beliau merasa bahwa pemerintah bertujuan hanya untuk kepentingan pemerintah saja dan masyarakat merasa tidak mendapatkan keuntungan dari maksud sosialisasi Dinas Pariwisata.

Masyarakat setempat masih bisa dipengaruhi oleh pihak lain sehingga perjanjian yang sudah dibicarakan dibatalkan atau dihentikan secara sepihak dan juga masyarakat hanya memikirkan keuntungan sepenuhnya untuk mereka. Padahal pemerintah hanya ingin membantu untuk mengembangkan tempat rekreasi yang ada di kabupaten Tapanuli Selatan salah satunya termasuk Aek Sijorni.⁵⁸

3. Kurangnya Komunikasi Antara Masyarakat dan Pemerintah

Pada pelaksanaan suatu kebijakan pentingnya komunikasi yang baik antara pelaksana dan pembuat kebijakan, pada tahun 2017 masyarakat dan pemerintah setempat sudah melakukan kesepakatan perjanjian untuk menyatukan pungutan retribusi, tetapi untuk pembagiannya masyarakat (pemilik lahan) merasa tidak sesuai dengan hasil kesepakatan, menurut ibu Dermiana pembagian hasil dari kesepakatan merugikan sebagian pemilik lahan.⁵⁹

Beberapa waktu lalu Dinas Pariwisata sudah melakukan mediasi dengan Masyarakat setempat, pada saat pelaksanaan mediasi masyarakat setuju dengan hasil kesepakatan yang telah dibahas

⁵⁷ Wawancara dengan Abdul Saftar, *Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Selatan*, tanggal 21 September 2020

⁵⁸ Wawancara dengan Masyuni Apriani Harahap, *Anggota Seksi Bidang Promosi Objek Wisata Kabupaten Tapanuli Selatan*, tanggal 21 September, 2020.

⁵⁹ Wawancara dengan Dermiana, *Pemilik Lahan*, tanggal 25 Agustus, 2020.

bersama-sama yaitu menyatukan segala bentuk pungutan untuk dijadikan satu pungutan menggunakan karcis. Namun, ketika ingin mengesahkan kesepakatan tersebut masyarakat berubah pikiran, banyak masyarakat yang jadi tidak setuju dengan kesepakatan yang ada. Kemungkinan itu terjadi karena masyarakat juga mendengarkan pihak ketiga yang menjadikan masyarakat setempat menjadi tidak konsisten.⁶⁰

4. Status Pekerjaan Masyarakat Setempat

Sebagian besar masyarakat setempat terutama pemuda setempat tidak memiliki pekerjaan sehingga menjadikan mereka tidak memiliki penghasilan. Sehingga salah satu pemilik lahan membiarkan para pemuda melakukan pengutipan diatas lahan mereka.

Pemilik lahan mengatakan “*Benna bahat naposo bulung di huta on napengangguran, arani ima makana hami padiar halai mangutip bope nadapot mangan-mangan sadari dohot parsigaret. daripada jadi halak na jahat halai dison, ra manakkoi, songon najolo nangge berani naposo nauli bulung desa nalain ro tuson benna jahat-jahat poso-poso dison ra mangkompasi anggo nadilehen halai diancam bage dope didokkon na mesum halai di sijorni on padahal alasan sajo so bia leng dapot hepeng ni nauli bulung narotu son*”. (Karena banyak pemuda di kampung ini yang pengangguran, karena itulah makanya kami biarkan mereka mengutip walaupun hanya untuk makan dan membeli rokok. Dari pada mereka jadi orang jahat disini, mau mencuri, seperti dulu tidak ada pemuda desa lain yang berani kesini karena jahatnya pemuda disini mau memalak kalau tidak dikasih mereka diancam dan dibilang mesum mereka di sijorni padahal hanya sebagai alasan mereka agar bisa mendapatkan uang).⁶¹

Para Pemuda setempat melakukan segala cara untuk mendapatkan uang masuk untuk kebutuhan mereka. Walaupun dengan cara yang merugikan orang lain dan mencoreng citra pariwisata itu sendiri.

⁶⁰ Wawancara dengan Abdul Saftar, *Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Selatan*, tanggal 21 September, 2020.

⁶¹ Wawancara dengan Rosidah Pulungan, *Pemilik Lahan*, tanggal 25 Agustus, 2020.

Masyarakat setempat atau pemuda setempat sudah merasa nyaman dengan keadaan mereka sekarang. Karena cukup dengan menjaga dibeberapa tekongan mereka sudah bisa menghasilkan uang untuk membeli makan atau hanya sekedar untuk membeli rokok. Karena berhubung juga pada masa sekarang sulitnya mencari pekerjaan.

D. Analisis Penulis

Dalam implementasi Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Tempat Rekreasi dan Olahraga di Aek Sijorni belum terealisasi sebagaimana semestinya. Kegiatan retribusi tersebut seharusnya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dan penghasilan asli daerah. Terdapat permasalahan dalam lokasi tempat rekreasi di Aek Sijorni yaitu lahan yang dijadikan sebagai jalan untuk menuju tempat rekreasi masih milik masyarakat setempat sehingga menimbulkan banyak pungutan disetiap langkah lahan.

Tidak ada masyarakat yang ingin menghibahkan sebagian lahannya untuk dibangun pemerintah dijadikan sebagai jalan umum yang kemudian akan dibuat retribusi resmi menggunakan karcis yang akan dibagikan secara merata kepada masyarakat yang lahannya dipakai untuk dijadikan jalan umum menuju tempat rekreasi sesuai dengan peraturan yang ada dan kesepakatan yang telah disepakati bersama. Jika pemerintah memberikan uang ganti rugi kepada pemilik lahan terhadap lahan yang akan dipakai tentu saja pemilik lahan akan mengizinkannya.

Masalah lainnya adalah kurangnya komunikasi pemerintah terutama Dinas Pariwisata dengan masyarakat setempat sehingga sebagian masyarakat memiliki rasa ketidakpercayaan terhadap pemerintah yang memang

bertujuan baik untuk meningkatkan kualitas Aek Sijorni seperti membangun fasilitas yang memadai serta kebersihan dan keamanan yang terjamin bagi para pengunjung dan manfaat yang didapatkan masyarakat setempat sesuai dengan apa yang telah diberikan. Pola pikir masyarakat yang belum terbuka juga membuat terhambatnya pengembangan potensi tempat rekreasi di Aek Sijorni.

Masalah lain yang muncul adalah ketika petugas keamanan yang ditugaskan untuk menindak tegas pungutan liar yang ada di Aek Sijorni tidak berjalan dengan semestinya. Masih banyak petugas tersebut yang membiarkan para pemuda setempat memungut pungutan tersebut, sehingga semakin banyaknya pungutan yang harus dibayar pengunjung dan hal tersebut bisa mengurangi minat kunjungan ke Aek Sijorni. Kondisi jalan yang harus dilalui pun rusak sehingga sewaktu-waktu bisa membuat para pengunjung tergelincir, terutama ketika datang hujan akan membuat jalan menjadi licin karena jalan tersebut masih berupa lahan yang dibuka, belum dibangun menjadi jalan khusus untuk dilewati.

Dalam hal ini peneliti ingin memberikan saran untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi di Aek Sijorni yaitu Pemerintah setempat harus kembali melakukan sosialisasi dan mediasi guna menumbuhkan dan meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, membuat gambaran tatanan dan susunan pembangunan yang akan di bangun di Aek Sijorni, membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat setempat dengan

menjadikan mereka sebagai petugas retribusi serta petugas kebersihan dan keamanan di lingkungan Aek Sijorni.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian yang telah peneliti kemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis akan mengambil beberapa kesimpulan dari hasil penelitian lapangan yang penulis lakukan selama ini serta memberikan saran sebagai langkah terakhir dalam penulisan hasil penelitian ini.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diungkapkan dalam skripsi ini dapat dilihat bahwa Implementasi Pasal 7 Ayat (2) poin a Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Studi Kasus di Aek Sijorni Desa Aek Libung Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan), yaitu:

1. Bahwa Implementasi Pasal 7 Ayat (2) poin a Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Studi Kasus di Aek Sijorni Desa Aek Libung Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan) belum terlaksana karena banyaknya regulasi yang mengatur tentang besaran retribusi tempat rekreasi yang berbeda seperti halnya di dalam Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 12 tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 10 Tahun 2006 dan Surat Perjanjian Nomor: 556/ 357/ 2017 tentang Pengutipan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. Namun dalam pelaksanaannya pihak pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan telah

2. melakukan sosialisasi dan mediasi dengan masyarakat bersama Camat Kecamatan Sayur Matinggi dan Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Selatan.
3. Adapun faktor penghambat dalam Implementasi Pasal 7 Ayat (2) poin a Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Studi Kasus di Aek Sijorni Desa Aek Libung Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan) terbagi menjadi empat, yaitu Pertama, status kepemilikan lahan menuju Aek Sijorni sehingga membuat disepanjang jalan menuju tempat rekreasi terjadi banyak pungutan tidak resmi. Kedua, Pola Pikir Masyarakat yang Masih Terbelakang membuat masyarakat mudah di pengaruhi oleh pihak lain yang membuat mereka menjadi tidak konsisten sehingga terkendalanya pembangunan untuk kemajuan Aek Sijorni. Ketiga, Kurangnya Komunikasi Antara Masyarakat dengan Pemerintah yang membuat masyarakat merasa bahwa pemerintah hanya mengutamakan kepentingannya tanpa memikirkan kepentingan dari masyarakat itu sendiri. Keempat, Status Pekerjaan Masyarakat Setempat karena susah nya mencari pekerjaan untuk masa ini maka masyarakat mencari jalan pintas untuk mendapatkan uang dengan cara mengutip disepanjang jalan menuju Aek Sijorni.

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan yaitu meliputi beberapa aspek yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan retribusi tempat rekreasi di Aek Sijorni.

Diharapkan kepada Pemerintah terutama Dinas Pariwisata untuk melakukan sosialisasi dan mediasi yang lebih baik dengan masyarakat setempat agar para pemilik lahan ingin menyatukan segala bentuk kutipan yang ada menjadi satu kutipan dan diresmikan dengan adanya karcis resmi guna meningkatkan minat pengunjung untuk mengunjungi salah satu icon wisata yang sangat terkenal di Tapanuli Selatan yaitu Aek Sijorni. Pemerintah Daerah juga diharapkan dapat memberikan uang ganti rugi kepada pemilik lahan, yang lahannya dijadikan jalan lewat oleh para pengunjung.

Perlu adanya komunikasi yang baik antara badan pelaksana dengan masyarakat dalam melaksanakan kebijakan retribusi, sehingga permasalahan yang ada dapat diselesaikan dengan cara musyawarah dan solusi serta pendapat dari masyarakat bisa terealisasi dengan baik, agar tidak terjadi perdebatan yang berkelanjutan. Dalam pembagian hasil dari retribusi harus dimusyawarahkan dengan seksama bersama masyarakat yang lahannya akan dijadikan jalan lewat menuju tempat rekreasi agar tidak terjadi lagi kesalahpahaman antara masyarakat dengan pemerintah. Mengenai besaran yang akan ditetapkan dan hasil yang dibagi harus sesuai dengan kesepakatan bersama dan tidak merugikan salah satu pihak.

Diharapkan Dinas Pariwisata dapat melaksanakan sasaran sesuai dengan standar kebijakan yang telah ditetapkan, sehingga tujuan dari kebijakan retribusi di Aek Sijorni ini tercapai dengan maksimal. Sumber daya yang berupa fasilitas penunjang tempat rekreasi segera dibangun seperti halnya kamar mandi umum, musholla di sekitar tempat rekreasi. Sehingga tidak ada lagi keluhan-keluhan dari pengunjung untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kebijakan retribusi di Aek Sijorni. Serta perlu perhatian dari pemerintah untuk membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat setempat agar masyarakat yang mengutip secara tidak resmi tidak kehilangan pemasukannya dengan cara seperti menjadikan masyarakat setempat sebagai petugas retribusi maupun petugas kebersihan dan keamanan.

Diharapkan juga kepada para penegak hukum agar menindak tegas apabila terjadi pelanggaran agar terciptanya tempat rekreasi yang aman dan nyaman, sehingga para pengunjung tidak perlu merasa khawatir akan kriminalisasi seperti pungli, pencurian dan sebagainya.

Diharapkan juga kepada masyarakat setempat bisa menjalankan dan konsisten apabila sudah ada kesepakatan dengan pemerintah dan juga diharapkan masyarakat ikut berkontribusi untuk peningkatan salah satu icon wisata yang sangat terkenal di Tapanuli Selatan. Pengunjung dan masyarakat juga diharapkan ikut menjaga kelestarian alam yang ada dengan cara tetap menjaga kebersihan lingkungan setempat dan tidak merusak keadaan alam ataupun fasilitas yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, Haedar. 2010. *Implementasi Kebijakan*, dalam *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1 No. 1.
- Amiruddin dan Arisikin, Zainal. 2010. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Bungin, Burhan. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Departemen Agama RI. 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Al-Huda.
- Effendi. 2017. *Keuangan Negara Suatu Tinjauan Komprehensif Dan Terpadu*. Surabaya: Airlangga University Perss.
- Fathoni, Abdurrahmat. 2011. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Halim, Abdul dan Ar Rozzaq, Gozalli. 2009. *Kontribusi Dan Efektifitas Retribusi Jasa Umum Terhadap Penerimaan pendapatan Asli daerah*. Surakarta: USM.
- Harahap, Rizka Sari Khairani. 2018. "*Potensi Konflik Keberadaan Wisata Aek Sijorni di Desa Aek Libung Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan*". Skripsi, Universitas Sumatera Utara.
- Hariwijaya, M. 2007. *Metodologi dan Penulisan SKRIPSI, TESIS DAN DESERTASI Untuk Ilmu Sosial dan Humanior*. Yogyakarta: Parama Ilmu.
- Indrati S, Maria Farida. 2007. *Ilmu Perundang-undangan, Cet. Ke-7*. Yogyakarta: Kanisius.
- Ismiranto. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*.
- Iswahyudi, Fauzi. 2019. *Peran Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah*. Medan: Enam Media.
- Jafar, Wahyu Abdul. 2018. "*Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist*", *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 3 No. 1.
- Karim, Adiwarmen A. 2007. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo.

- Labaeni, Rahmat P. dkk. 2005. *“Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (Studi di Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi Kota Kotamobagu)”*. Jap. Vol. 3 No. 31.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Munawir. 1995. *Analisa Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty.
- Perda Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 10 Tahun 2006
- Prihati. 2018. *Implementasi Kebijaksanaan Promosi Pariwisata dalam Pengembangan Potensi Wisata Daerah*. Surabaya: Jakad Publishing.
- Putri, Eka Bella Amalia. 2019. *“Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga di Kabupaten Tanggamus”*. Universitas Lampung.
- Qardhawiy, Yusuf. 1988. *Hukum Zakat*. Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa.
- Sayadi. 2017. *“Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Retribusi Rekrasi Di Kawasan Objek Wisata Batu Hiu”*, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol. 3 No.3.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Surgana, Aqsha. 2016. *“Implementasi Peraturan Daerah Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Terkait Tempat Rekreasi dan Olahraga di Kota Surakarta (Study kasus di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Kota Surakarta)”*. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Sutedi, Adrian. 2008. *Hukum Pajak dan retribusi Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
- UUD 1945

CURICULUM VITAE
(*DAFTAR RIWAYAT HIDUP*)

Nama Lengkap : ADHIA RAHMA SHINTA HARAHAAP
NIM : 1610300007
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan
Tempat / Tanggal Lahir : Jakarta, 7 April 1998
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tinggi / Berat Badan : 158 cm / 50 kg
Status : Belum Menikah
Alamat : Gunung Tua, Padang Bolak, Kab. Padang Lawas
Utara

Nama Orang tua

a. Ayah : IDHAM KHALIK HARAHAAP
b. Ibu : ARIYANTI RAYA SIREGAR

PENDIDIKAN FORMAL

2004-2010 : SD Negeri 13 Jakarta
2010-2013 : SMP Negeri 187 Jakarta
2013-2016 : MA Negeri 12 Jakarta
2016-sekarang : S-1 Hukum Tata Negara, IAIN Padangsidimpuan

PENGALAMAN/ORGANISASI

2018- 2019 : Sekretaris Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara(HMJ- HTN).

2018-2019 : Anggota PKH (Pusat Kajian Hukum) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

2018-2019 : Anggota Qiyamul Lughah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Demikian *curriculum vitae* ini saya isi dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan seperlunya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Selatan

1. Bagaimana cara Bapak/Ibu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Perda nomor 10 tahun 2006 tentang Retribusi tempatrekreasi dan olahraga di Aek Sijorni?
2. Bagaimana bentuk sosialisasi yang diberikan agar dapat memberi pemahaman terhadap Perda tentang Retribusi tempatrekreasi dan olahraga di Aek Sijorni?
3. Bagaimana arah kebijakan Retribusi di Aek Sijorni?
4. Bagaimana harapan Bapak/Ibu untuk Retribusi di Aek Sijorni kedepan?
5. Adakah permasalahan masyarakat ketika Retribusi diterapkan di Aek Sijorni?

B. Masyarakat Desa Aek Libung Kabupaten Tapanuli Selatan

1. Bagaimana menurut Bapak/ Ibu mengenai Retribusi di Aek Sijorni?
2. Apakah Bapak/ Ibu mengetahui tentang Perda nomor 10 tahun 2006 tentang Retribusi tempatrekreasi dan olahraga di Aek Sijorni?
3. Bagaimana menurut Bapak/ Ibu tentang penerapan Perda nomor 10 tahun 2006 tentang Retribusi tempatrekreasi dan olahraga di Aek Sijorni?
4. Bagaimana harapan Bapak/Ibu untuk Retribusi di Aek Sijorni kedepan?

C. Pengunjung Aek Sijorni Kabupaten Tapanuli Selatan

1. Bagaimana menurut saudara mengenai Retribusi di Aek Sijorni?
2. Bagaimana harapan saudara untuk Retribusi di Aek Sijorni?

DOKUMENTASI















KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : B- 526 /In.14/D.1/TL.00/08/2020
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

3 Agustus 2020

Yth, Kepala Dinas Pariwisata Tapanuli Selatan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Adhia Rahma Shinta Harahap
NIM : 1610300007
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara
Alamat : Sigama, Padang Bolak
No Telp : 085922131956

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Implementasi Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Study Kasus Aek Sijorni Desa Aek Libung Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan)".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas, menurut ketentuan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan Bapak kami ucapkan terimakasih



an Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Ikhsanuddin Harahap, M.Ag.
NIP. 197501032002121001



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS PARIWISATA DAERAH

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAHAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN
JL.PROF.LAFRAN PANE - SIPIROK
Kode Pos 22742 Faks. (0634) -

E-Mail : dispardatapsel@gmail.com Webside : pariwisata.tapselkab.go.id

SIPIROK

Sipirok, 14 Agustus 2020

Surat : 800/1269/2020
Tentang : -
Maksud : -
Perihal : Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi

Kepada Yth :
Bapak Kementerian Agama Republik Indonesia
C/q. Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
di

Tempat

Sehubungan dengan permohonan Saudari Adnia Rahma Sinta Harahap tentang Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi dengan Nomor surat: B-526/In.14/D.1/TL.00/08/2020 tanggal 3 Agustus 2020.

Maka bersama ini kami dari Dinas Pariwisata Daerah pada prinsipnya setuju dan tidak merasa keberatan untuk memberikan data dan informasi tentang urusan judul skripsi dengan judul : Implementasi pasal 7 Ayat 2 (dua) Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Retribusi tempat Rekreasi dan Olahraga (Study kasus Aek Sijorni Desa Aek Libung Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan).

Demikian kami sampaikan untuk dipergunakan seperlunya.



KEPALA DINAS PARIWISATA DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

ABDULSAFTAR,S.Sos,MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197208231993031002